

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi
Administrasi Publik

Oleh:
JUNIPILAU
NIM. 24.11.233168



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, ADMINISTRASI
DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2026**

ABSTRAK

JUNIPILAU. 2026 Implementasi Kebijakan Penertiban an Pengawasan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat. Pembimbing I Dr. SAIPUL, S.Sos.,M.A.P dan Pembimbing II LUCI AFIANI OKTAVIA, S.I.Kom.,M.A.P.

Beberapa penelitian terdahulu mengklaim bahwa tehnik pengawasan merupakan teknis yang tepat untuk menentukan tindakan penertiban dan penataan PKL (Khasanah, 2016; Destiningsih dan Lestari, 2020; Sulastri, 2022; Roies, 2023; Rimantoro dkk, 2025). Faktanya tehnik pengawasan tersebut tidak berpengaruh pada ketaatan PKL dalam menjalankan usaha, bahkan jumlah pelanggaran PKL di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan cenderung meningkatkan secara signifikan dalam tiga tahun terakhir mulai Tahun 2023-2025 dengan rata-rata peningkatan sebesar 33,48%.

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan PKL di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipengaruhi oleh empat indikator dalam Teori Edward III yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dan peluang didalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Teori Edward III. Locus penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat. Bunu (2022) mendefinisikan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Metode kualitatif sangat ideal digunakan dan penggunaan kualitatif dalam penelitian ini tidak bisa dihindarkan (Johnston, 2013:46) sebab akan mendapatkan gambaran secara utuh yang akan dideskripsikan mengenai implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan PKL di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik dalam pelaksanaannya dengan diperkuat indikator pendukung yaitu komunikasi internal dan eksternal, sumber daya peralatan, personil, disposisi perintah tugas yang wajib dilaksanakan serta struktur birokrasi fleksibel.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PKL, Satuan Polisi Pamong Praja, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

ABSTRAC

JUNIPILAU, 2026

Implementation of the Policy on Controlling and Supervising Street Vendors by the Civil Service Police Unit of West Kotawaringin Regency. Supervisor I Dr. SAIPUL, S.Sos.,M.A.P and Supervisor II Luci Afiani Oktavia, S.I.Kom.,M.A.P

Several previous studies have claimed that monitoring techniques are the right technique for determining actions to regulate and organize street vendors (Khasanah, 2016; Destiningsih and Lestari, 2020; Sulastri, 2022; Roies, 2023; Rimantoro et al., 2025). In fact, these monitoring techniques have no effect on street vendor compliance in running their businesses, in fact, the number of street vendor violations in Pangkalan Bun, South Arut District, tends to increase significantly in the last three years from 2023-2025 with an average increase of 33.48%.

This research will reveal how the implementation of the policy of controlling and supervising street vendors in Pangkalan Bun, South Arut District by the Civil Service Police Unit of West Kotawaringin Regency which is influenced by four indicator in Edward III's Theory, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure as well as inhibiting and opportunity factors in the implementation of the policy. This study uses a qualitative method with the Edward III Theory approach. The research locus is the Civil Service Police Unit of West Kotawaringin Regency. Bunu (2022) defines qualitative as aiming to gain an understanding of reality through an inductive thinking process. Qualitative methods are very ideal to use and the use of qualitative in this study cannot be avoided (Johnston, 2013: 46) because it will get a complete picture that will be described regarding the implementation of the policy of controlling and supervising PKL in Pangkalan Bun, South Arut District by the Civil Service Police Unit of West Kotawaringin Regency.

The conclusion of this study is that the implementation of the policy of regulating and supervising street vendors by the Civil Service Police Unit of West Kotawaringin Regency has been quite good in its implementation, strengthened by supporting indicators, namely internal and external communication, equipment resources, personnel and budget, disposition of mandatory task orders and a flexible bureaucratic structure.

Keywords: *Policy Implementation, PKL, Civil Service Police Unit, communication, resources, disposition and bureaucratic structure.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT”.

Kajian proposal penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah terhadap penataan pedagang kaki lima di Pangkalan Bun dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan meliputi: pendahuluan, tinjauan pustaka dan metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan serta daftar pustaka.

Penulis menyadari bahwa kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah mengarahkan segala kemampuan untuk meneliti, tetapi masih ada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan peran yang bersifat membangun agar tulisan ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palangka Raya, Maret 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pengesahan dan Identitas Penguji	iii
Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Abstrak	ix
<i>Abstrac</i>	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	11
1. Implementasi	11
2. Kebijakan	14
3. Perumusan Kebijakan Publik.....	17
4. Implementasi Kebijakan.....	19
5. Aktor Formulasi Kebijakan Publik	21
6. Pedagang Kaki Lima	23
7. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	25
8. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.....	27
9. Pengawasan Kebijakan	30
10. Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	35
C. Kerangka Berpikir	37
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Locus Penelitian.....	47
C. Sumber Data	47
D. Instrumen Penelitian.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisa Data	54
G. Keabsahan Data	56
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 58
A. Gambaran Umum Penelitian.....	58

B. Hasil Penelitian	63
1. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pangkalan Bun.....	63
2. Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah	65
a. Pengaturan.....	66
b. Penertiban	67
c. Pengawasan.....	67
d. Penindakan.....	68
3. Kebijakan Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima	69
a. Komunikasi	69
b. Sumber Daya	72
c. Disposisi.....	82
d. Struktur Birokrasi	85
C. Pembahasan	87
1. Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengawasan PKL di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan	87
2. Hambatan dan Peluang dalam mengimplementasikan kebijakan dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.....	95
 BAB V PENUTUP	 99
1. Kesimpulan	99
2. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1	Keterkaitan Antara Tema Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Informan Sumber Data.....	53
Tabel 4.1	Jumlah Personil Pol PP Tahun 2026	63
Tabel 4.2	Keberadaan PKL di Pangkalan Bun berdasarkan cakupan wilayah.....	64
Tabel 4.3	Daftar Peralatan Penataan PKL	73
Tabel 4.4	Hasil Perolehan Data Kebutuhan Penertiban dan Pengawasan PKL	74
Tabel 4.5	Jumlah Personil Bidang Tibumtran.....	76
Tabel 4.6	Dokumen Anggaran Prioritas Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	42
Gambar 3.1	Teknik Analisis Data	54
Gambar 4.1	Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat	62
Gambar 4.2	Struktur Pemerintah Pelaksanaan	79

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (1997). Analisis kebijaksanaan. *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Afriyoga, N., & Syaprianto, S. (2025). PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SENAPELAN. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(1), 60-67.
- Badan Pusat Statistik (2025). Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2025. Vol. 26. BPS Kab. Kotawaringin Barat
- Basrowi, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekia
- Bunu, H. Y. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Kontemporer. *Surabaya: Jengala Pustaka Utama*.
- Bunu, Y. H. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandar Lampung: Pusaka Media*.
- Destiningsih, R., & Lestari, E. (2020). Analisis kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota magelang dalam penanganan pedagang kaki lima. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 78-87.
- Dewi, E. N., Roza, D., & Mulyawan, F. (2026). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(4), 764-771.
- Dunn, William N 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dye, Thomas R, 2005. Understanding Public Policy, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Ferine, K. F. (2024). *Pengukuran Kinerja SDM*. Selat Media.
- Islamy, M.Irfan. 1998. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M.Irfan. 2002. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jannati, M. L., & Sutoyo, J. (2017). Hasil dan Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. *Indonesian Journal of Criminology*, 13(1), 229089.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, N. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB

P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013-2016. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa*.

- Kristianto, T., & Farhana, F. (2024). Efektifitas Penegakan Perda No 8 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Cipete Selatan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 416-426.
- Liau, G. (2015). *Administrasi pembangunan: studi kajian PKL*. Refika Aditama.
- Mangkunegara, A. A. P., & Puspitasari, M. (2015). Kecerdasan emosi guru, stres kerja, dan kinerja guru SMA. *Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 45(2).
- Maya, M. D. S., Harianto, S., & Setyowati, R. N. (2023). DEHUMANISASI PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA:(Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya). *Jurnal Neo Societal*, 8(2), 121-130.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.
- Mubarok, R., Santoso, B. and Njatrijani, R. 2017. Pertanggungjawaban Agen branchless Banking terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum antara Agen-Prinsipil dan Konsumen)', *Diponegoro Law Journal*, 6(2): 1–12.
- Nigro, F. A., & Nigro, L. G. (1970). Modern Public Administration, New York. *International edition*.
- Parsons, W., & Greenwood, J. (1996). Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. *Public Administration-Abingdon*, 74(2), 337-337.
- Rimantoro, F. N., Nugroho, A. A., Dewi, C. K., & Puspitaningrum, D. I. (2025). Penerapan Tindakan Yustisi Dan Non Yustisi Dalam Penertiban PKL Oleh Satpol PP Kabupaten Kediri. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(1), 81-95.
- Roeis, G. M., & Sion, H. (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Taman Kota Manis Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 17(1), 95-109.
- Rukmana, M. G., & Ip, D. (2019). Fenomena Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 3(3), 45-59.

- Rusdi, R., Kadir, M. A. A., Kelibey, I., & Basri, L. (2021). Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1(2), 10-24.
- Sari, L. (2018). Peranan Pemerintah Daerah dalam Penertiban PKL. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 120-130.
- Sarjono, Y. (2005). Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Spradley J. The Ethnographic Interview. EEUU: Hardcourt, 1979
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 165.
- Suherman, A., & Siska, E. (2025). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Yayasan Drestanta Pelita Indonesia*.
- Sulastri, F. (2022). *Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Susanti, Y., & Nugroho, A. (2020). Tantangan Pengelolaan Ruang Publik dan PKL di Kota Besar. *Jurnal Tata Kota dan Lingkungan*, 5(2), 75-84.
- Syaukani, ad all, 2004, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka. Pelajar, Yogyakarta
- Wahab, S. A. (1991). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta. *Wibawa, Samodra. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta*.
- Widaningsih, R. A., Sukristanta, S., & Kasno, K. (2020). Tantangan Bagi Organisasi dalam Mempertahankan Kinerja Pegawai Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Al Tijarah*, 6(3), 193-198.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan.
- Strieker, T., Adams, M., Cone, N., Hubbard, D., & Lim, W. (2016). Supervision matters: Collegial, developmental and reflective approaches to supervision of teacher candidates. *Cogent Education*, 3(1).
- Winardi, J. 1977. Azas-Azas Management, Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang P, 1988. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Salsabila, C. (2022). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Peraturan-Peraturan

Indonesia, R. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Barat, Kotawaringin. (2007). Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penertiban, Pengawasan dan Penataan PKL.

Barat, Kotawaringin. (2014). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Barat, Kotawaringin. (2019). Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.